



Metode Sistem Pengendalian Internal melalui Audit Berbasis Risiko (ABR) pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Yohanes Arnoldus Putra Perdana Seran^{1*}, Minarni A. Dethan², Maria P. L. Muga³

¹⁻³Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: perdanaseran5@gmail.com ^{1*}

Abstract This study aims to determine how the implementation of the Internal Control System and the implementation of Internal-Based Audits at the Inspectorate of East Nusa Tenggara Province. This study focuses on the assessment of the components of the Internal Control System and the implementation of Risk-Based Audits at the Inspectorate of East Nusa Tenggara Province. The research method used in this study is descriptive qualitative, data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Several informants interviewed include Auditors and Supervisors of Regional Government Affairs Organizer. The results of this study indicate that the Inspectorate of East Nusa Tenggara Province has implemented several components in the Internal Control System and also the implementation of Risk-Based Audits.

Keywords: Internal Control System, Risk Based Audit, Inspectorate, Control, Supervision

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem Pengendalian Internal dan pengimplementasian Audit Berbasis Internal pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini berfokus pada penilaian terhadap komponen Sistem Pengendalian Internal dan pengimplementasian Audit Berbasis Risiko pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Beberapa informan yang diwawancarai antara lain, Auditor dan Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menerapkan beberapa komponen dalam Sistem Pengendalian Internal dan juga pengimplementasian Audit Berbasis Risiko.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Audit Berbasis Risiko, Inspektorat, Pengendalian, Pengawasan

1. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi di Indonesia merupakan sebuah agenda besar yang diharapkan mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, pemerintah menetapkan arah kebijakan dan strategi nasional untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Salah satu fokus utama dalam grand design tersebut adalah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara, yang diharapkan memiliki karakteristik integritas tinggi, netralitas, profesionalisme, dan kinerja unggul. Dalam praktiknya, reformasi ini tidak hanya menuntut perubahan perilaku individu, tetapi juga perubahan struktural dan sistemik, termasuk sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Namun, kenyataannya implementasi reformasi birokrasi, terutama dalam aspek pengawasan internal pemerintahan daerah, masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Fenomena ketidakpatuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya sistem pengendalian internal, serta belum optimalnya peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjadi hambatan yang nyata

dalam mencapai tujuan reformasi birokrasi. Di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Inspektorat Daerah sebagai ujung tombak APIP di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, belum sepenuhnya mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Fungsi strategis Inspektorat dalam kerangka pengawasan internal sebenarnya telah ditegaskan dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem ini dirancang untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun, pada tataran implementasi, ditemukan bahwa masih terdapat banyak kelemahan dalam sistem pengendalian internal instansi pemerintah daerah, baik dari sisi struktur kontrol, mekanisme pelaporan, maupun pemisahan fungsi kerja yang jelas.

Laporan audit Inspektorat Provinsi NTT tahun 2023 misalnya, menunjukkan masih adanya berbagai kelemahan signifikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program kerja di sejumlah dinas. Kelemahan-kelemahan tersebut pada umumnya disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi pengendalian internal serta kurangnya ketepatan dalam pemetaan risiko oleh APIP. Padahal, sebagaimana diatur dalam PP No. 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (6), Inspektorat Provinsi sebagai APIP memiliki tanggung jawab langsung kepada gubernur untuk melaksanakan pengawasan internal yang kredibel dan akuntabel. Dalam konteks inilah, pendekatan Audit Berbasis Risiko (Risk-Based Audit/RBA) menjadi sangat penting, karena dapat digunakan untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi organisasi dan menentukan prioritas pengawasan sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Audit berbasis risiko bukan sekadar alat teknis, melainkan sebuah metode strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal. Melalui pendekatan ini, auditor dapat mengevaluasi efektivitas pengendalian, mengukur tingkat penyimpangan, dan memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat sistem pengendalian internal. RBA juga menjadi pendekatan yang fleksibel, responsif terhadap dinamika risiko, serta mampu memberikan nilai tambah dalam bentuk perbaikan sistem dan proses kerja. Oleh karena itu, integrasi antara pengawasan internal dan manajemen risiko menjadi faktor kunci dalam mendorong pencapaian target pembangunan daerah, khususnya target-target yang tercantum dalam RPJMD.

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, penguatan peran Inspektorat sebagai pelaksana audit berbasis risiko menjadi sangat krusial. Tidak hanya karena kebutuhan akan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, tetapi juga karena kondisi geografis, kapasitas SDM, serta

kompleksitas permasalahan pembangunan di wilayah ini yang menuntut pengawasan lebih adaptif dan tepat sasaran. Dengan pendekatan audit berbasis risiko, Inspektorat diharapkan dapat lebih mampu mengidentifikasi titik-titik rawan penyimpangan, mengevaluasi efektivitas pengendalian, dan memastikan akuntabilitas penggunaan sumber daya daerah dalam mendukung pencapaian tujuan RPJMD.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis terhadap sistem pengendalian internal melalui pendekatan audit berbasis risiko bukan hanya relevan tetapi juga sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini menjadi signifikan karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas sistem pengendalian internal dalam praktik, khususnya oleh APIP di lingkungan pemerintah daerah Provinsi NTT. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam literatur pengawasan pemerintahan daerah, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap risiko.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah jenis data kualitatif, yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari Narasumber atau informan baik secara lisan maupun tulisan pada saat peneliti melakukan Studi Pustaka, Wawancara dan juga Dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada kinerja APIP selaku pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta terlibat di dalam sistem pengendalian internal untuk membantu instansi dalam menentukan kriteria APIP dan juga sebagai bentuk saran kepada instansi mengenai Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki Inspektorat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Auditor serta orang atau pelaku yang benar tahu atau menguasai masalah, serta terlibat langsung dalam masalah penelitian, Informan penelitian ini sebanyak 3 orang dengan jabatan sebagai auditor dan pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Sugiyono, 2017:246). Penelitian ini juga menggunakan alat bantu Nvivo dengan analisis data pada NVivo 14 terdiri dari 5 tahap yakni, *entry data*, *coding*, eksplorasi, visualisasi, dan penyajian.

Tahap yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran keseluruhan data dan mengidentifikasi segmen data yang memiliki potensi untuk mengungkapkan aspek aspek fenomena yang sedang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan komponen utama yang menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Lingkungan ini mencerminkan nilai, budaya organisasi, serta komitmen pimpinan terhadap pengendalian dan tata kelola yang baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jackson selaku Auditor Muda di Inspektorat Provinsi NTT, sistem pengendalian internal di Inspektorat tergolong ketat, dengan evaluasi tahunan dan perbaikan berkelanjutan. Setiap awal tahun dilaksanakan rapat evaluasi kinerja, di mana hasil audit dari masing-masing bidang dipresentasikan dan dianalisis, lalu diberikan solusi atau penyesuaian norma oleh Inspektur.

Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Fahmi dan Bapak Isharyanto yang menyampaikan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan efektif sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008. Salah satu indikatornya adalah adanya tim audit yang terdiri dari Inspektur, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota, yang menunjukkan struktur kerja yang sistematis. Hasil analisis Nvivo 14 menunjukkan bahwa kata "pengendalian" muncul dengan frekuensi tertinggi (3,20%), menandakan bahwa pengendalian menjadi elemen kunci dalam manajemen internal Inspektorat.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan elemen penting yang menentukan fokus dan arah audit. Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan penilaian risiko dengan menyusun daftar risiko pada awal tahun berdasarkan program kerja yang direncanakan. Kegiatan audit kemudian diarahkan pada area dengan tingkat risiko tinggi. Penilaian ini mencakup identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko baik internal maupun eksternal. Evaluasi risiko dilakukan secara berkala terhadap perangkat daerah guna memastikan akurasi dan kesesuaian daftar risiko yang disusun oleh masing-masing unit kerja.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian dilakukan secara sistematis, mulai dari perencanaan sampai tindak lanjut hasil audit. Prosedur pengendalian ditetapkan secara tertulis dan menjadi acuan dalam pelaksanaan audit serta monitoring tindak lanjut rekomendasi. Apabila ditemukan kejanggaran dalam pemeriksaan, dikeluarkan laporan hasil audit yang kemudian dimonitor progres perbaikannya baik untuk internal Inspektorat maupun perangkat daerah terkait.

4. Informasi dan Komunikasi

Inspektorat Provinsi NTT mengembangkan sistem komunikasi terstruktur dalam pelaksanaan audit. Komunikasi antar anggota tim dilakukan secara vertikal dan horizontal, baik secara langsung maupun melalui media daring seperti grup WhatsApp, pedoman teknis, dan surat edaran. Informasi disampaikan dengan jelas dari ketua tim kepada inspektur pembantu, lalu kepada pimpinan tertinggi, sehingga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses audit.

5. Pemantauan

Proses pemantauan dilakukan melalui rencana aksi dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap temuan audit ditindaklanjuti dan ditangani sesuai standar operasional prosedur. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas perbaikan dan komitmen pelaksanaan rekomendasi oleh perangkat daerah.

Implementasi Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko merupakan metode audit yang fokus pada identifikasi dan manajemen risiko untuk menjamin bahwa risiko telah terkendali dan tidak mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Berdasarkan wawancara dengan tiga narasumber, diketahui bahwa Inspektorat Daerah Provinsi NTT telah menerapkan pendekatan audit ini, terutama pada program-program strategis prioritas Gubernur seperti program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS).

Audit difokuskan pada aspek anggaran dan pelaksanaan program, di mana risiko tertinggi biasanya ditemukan. Penentuan prioritas risiko dilakukan berdasarkan beberapa indikator seperti nilai anggaran, tingkat keterlibatan SDM, dan potensi konflik kepentingan. Inspektorat juga menyusun daftar risiko setiap awal tahun sebagai bagian dari manajemen risiko organisasi.

Namun, pengimplementasian audit berbasis risiko dihadapkan pada berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal. Hambatan internal mencakup konflik kepentingan antarpegawai, kekurangan SDM auditor, serta miskomunikasi antara pimpinan dan pelaksana audit. Hambatan eksternal mencakup keterbatasan waktu, lokasi audit, karakter masyarakat lokal, dan tidak semua perangkat daerah memiliki daftar risiko yang valid. Untuk mengatasi kendala ini, Inspektorat melakukan tindak lanjut berupa monitoring, rencana aksi, dan evaluasi progres perbaikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan.

Analisis data menggunakan software Nvivo 14 menunjukkan bahwa kata "pemeriksaan" dan "rekomendasi" mendominasi pembahasan mengenai audit berbasis risiko, menandakan fokus utama audit berada pada efektivitas pelaksanaan program dan penyusunan rekomendasi. Audit internal juga dilakukan secara mandiri apabila pengawasan eksternal oleh Irjen Kemendagri atau BPKP tidak tersedia.

Analisis Komprehensif Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008

Secara keseluruhan, sistem pengendalian internal Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah sesuai dengan lima komponen pengendalian dalam PP No. 60 Tahun 2008: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Dalam perspektif teori institusional, praktik-praktik pengawasan Inspektorat dapat dikategorikan sebagai bentuk isomorfisme normatif, di mana tekanan terhadap norma dan aturan formal mendorong organisasi untuk mengadopsi mekanisme pengendalian internal secara struktural.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan implementasi audit berbasis risiko merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Inspektorat. Oleh karena itu, penguatan SDM auditor, pelatihan berkelanjutan, dan perbaikan sistem komunikasi serta manajemen risiko menjadi kunci peningkatan kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT di masa mendatang.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah banyak menerapkan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. Dimulai dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Kebijakan pengawasan dilakukan berdasarkan standar yang telah berlaku.

2. Inspektorat telah melaksanakan audit berbasis risiko sesuai dengan standarnya kepada perangkat-perangkat daerah. Dimulai dari mitigasi risiko di awal tahun, pemeriksaan, pemantauan, dan rencana aksi terhadap laporan hasil pemeriksaan. Perlu peningkatan di sektor kesadaran akan pentingnya audit berbasis risiko di lingkungan internal Inspektorat dan juga perangkat-perangkat daerah dibawah naungan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Saran

1. Bagi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Saran bagi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kedepannya memperhatikan jumlah auditor yang ada di Inspektorat, agar tidak kesusahan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga diharapkan bisa lebih maksimalkan lagi dalam pengimplementasian audit berbasis risiko di perangkat daerah tujuannya agar setiap perangkat daerah dapat meminimalisir risiko terhadap kegiatan yang direncanakan, dimana perlu juga pendampingan dari inspektorat untuk mengimplementasikannya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel kinerja inspektorat dalam pengawasan keuangan terhadap Target RPJMD untuk mengetahui dampak sistem pengendalian internal terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi nusa tenggara Timur.

DAFTAR REFERENSI

- Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit internal berbasis risiko* (Tarmizi & A. Ulinnuha, Eds.; I). PT Bumi Aksara.
- Ardianiningsih, A. (2018). *Audit laporan keuangan* (B. S. Fatmawati, Ed.; I). PT Bumi Aksara.
- Bagaskara, D. Y., & Rohmadi, R. (2024). Analisis pemetaan media tentang pembiayaan rahn di Indonesia dengan NVivo: Studi literatur review. *Journal of Management and Digital Business*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.53088/jmdb.v4i1.811>
- Darono, A. (2012). Penggunaan teori institusional dalam penelitian teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2012 (SNATI 2012)*, 2012(SNATI), 15–120.
- Fajrin, R. R., Castellani, S. E. J., & A. K. (2022). Pengaruh kompetensi auditor eksternal dan perilaku disfungsional auditor eksternal terhadap kualitas audit (Studi kasus pada ...). <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57254>
- Ghozali, I. (2020). *25 grand theory* (viii). Yoga Pratama.

- Hama, A., Filianus, M., Murwati, Y., & Helena N, M. (2021). Pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan (Studi kasus pada koperasi di Kecamatan Payangan). *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(1), 63. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131>
- Istiqomah, N. (2018). Analisis implementasi *Government Finance Statistics* di Indonesia: Pendekatan teori institusional. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 3(2), 69–90. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i2.66>
- Junaidi, & Nurdiono. (2016). *Kualitas audit* (B. Hartadi, Ed.). CV. Andi Offset.
- Mada, U. G., Akuntansi, D., Ekonomika, F., & Gadjah, U. (2023). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(3), 310–323.
- Margareth, H. (2017). Pengaruh karakteristik aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Экономика Региона*, 32.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur. (2019). *Perda RPJMD NTT tahun 2018–2023*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Republik Indonesia, 2504, 1–9.
- Purba, R. B., Umar, H., Siregar, O. K., & Eriadi. (2022). *Model pengawasan intern keuangan desa: Upaya pencegahan tindak korupsi*. Merdeka Kreasi Group.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-26). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018a). *Metode penelitian manajemen: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi (mixed methods), penelitian tindakan (action research) dan penelitian evaluasi* (Setiyawami, Ed.; Edisi ke-6). Alfabeta.
- Sugiyono. (2018b). *Metode penelitian manajemen* (Setiyawami, Ed.; Edisi ke-6). Alfabeta.
- Syafrizal Helmi, S., Muda, I., Dalimunthe, D. M. J., Fadli, & Syarif, F. (2010). *Analisis data untuk riset manajemen dan bisnis* (Edisi 1).
- Ummah, M. S. (2019). Implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y>
- Widodo, M. (2018). Audit berbasis risiko pada PT. SP. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Kreatif*, 3(2), 63–74. <http://journal.stienugresik.ac.id/index.php/jek/article/view/12>

- Wang, J. (2010). Long chain aliphatic amine-modified heteropolyacid catalysts for hydroxylation of benzene to phenol with molecular oxygen. *Cuihua Xuebao/Chinese Journal of Catalysis*, 31(6), 623–625. [https://doi.org/10.1016/s1872-2067\(09\)60076-0](https://doi.org/10.1016/s1872-2067(09)60076-0)
- Zamzani, F., Faiz, I. A., & Mukhlis. (2018). *Audit internal, konsep dan praktik* (Sesuai *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* 2013). Gadjah Mada University Press.